

## Kepemimpinan Strategis Kepala Daerah dalam Aktualisasi Bela Negara Masyarakat di Jawa Barat

Ria Purwati<sup>1</sup> Hikmat Zakky Almubaroq<sup>2</sup> Edy Saptono<sup>3</sup>

Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,  
Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [riapurwa21@gmail.com](mailto:riapurwa21@gmail.com)<sup>1</sup> [zakkyauri94@gmail.com](mailto:zakkyauri94@gmail.com)<sup>2</sup> [edy.saptono31@gmail.com](mailto:edy.saptono31@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Kepemimpinan strategis kepala daerah berperan penting dalam aktualisasi bela negara masyarakat di Jawa Barat. Kepala daerah sebagai pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menumuhkan kesadaran bela negara masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang kepala daerah memiliki gaya kepemimpinan yang dimiliki dan diterapkan. Kepemimpinan seorang kepala daerah menjadi landasan bagi rakyatnya dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Seorang pemimpin menjadi teladan bagi rakyatnya yang memiliki prinsip dan tujuan serta memiliki jiwa kepemimpinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala daerah di Jawa Barat dalam aktualisasi bela negara pada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literasi. Dengan menggunakan strategi kepemimpinan *AURA* (*Authority, Used, Responsibility dan Attitude*) dan dipadukan dengan nilai-nilai dasar bela negara yakni cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara maka kepala daerah dapat memaksimalkan implementasi bela negara pada masyarakat di Jawa Barat.

**Kata Kunci:** Kepemimpinan, Bela Negara, Jawa Barat



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Bela negara merupakan sebuah sikap berani berkorban untuk tanah air demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk dari Bela Negara adalah tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Wujud dari usaha Bela Negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yuridiksi nasional. Bagi warga negara Indonesia, usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar negara serta berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara (Christiansen, Fatiha, Ar-Rahman, & Tarina, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengatakan bahwa “upaya bela negara adalah sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Bela Negara tidak hanya mengangkat senjata, bela negara memiliki arti yang lebih mendalam terlebih dalam kondisi damai seperti sekarang ini, yaitu bagaimana seorang warga negara bersikap dalam mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya (Aiba, Harnowo, Suprpto, & Saragih, 2018).

Menumbuhkan kesadaran bela negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat dalam hal ini kementerian pertahanan saja, melainkan pemerintah daerah mempunyai peran dalam sosialisasi bela negara di daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38

Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah, telah diatur mengenai tanggung jawab kepada daerah dalam hal ini gubernur tingkat provinsi dan bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota. Peraturan ini menjadi dasar bagi kepala daerah untuk melakukan peningkatan kesadaran bela negara di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan peraturan tersebut, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepala daerah mempunyai tugas : Menyelenggarakan dan mendukung kegiatan peningkatan kesadaran bela negara; Mengkoordinasikan penyelenggara pemerintahan daerah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba, lembaga pendidikan dan organisasi pers dalam peningkatan kesadaran bela negara di wilayahnya. Berdasarkan tugas tersebut, pemerintah daerah tingkat provinsi yang dipimpin oleh gubernur bertugas dalam penyelenggaraan dan aktualisasi bela negara bagi masyarakat daerah.

Di dalam organisasi pemerintahan daerah, dimensi kepemimpinan merupakan suatu hal yang menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi pemerintahan daerah. Kompetensi kepemimpinan dapat diketahui dari keberhasilan seorang pemimpin dalam mencapai tujuan organisasi. Kepala daerah sebagai pemimpin dituntut harus mampu membawa organisasi yang dipimpinnya kearah yang lebih baik dan memberikan pelayanan yang maksimal serta berkualitas. Sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa kepemimpinan yang baik, akan sulit bagi organisasi pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan (Budi, 2013).

Jawa Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak di pulau jawa yakni sebanyak 49.565.200.000 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2020). Dengan jumlah penduduk yang banyak tersebut, sosok kepala daerah sangat diperlukan sebagai figur dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat. Jawa Barat dipimpin oleh seorang kepala daerah dalam hal ini gubernur Ridwan Kamil untuk masa jabatan 2019-2024. Ridwan Kamil merupakan sosok yang sangat dikagumi oleh masyarakat Jawa Barat karena gaya kepemimpinannya yang khas dan membaaur dengan masyarakatnya.

Banyaknya penduduk di Jawa Barat tentunya berbanding lurus dengan banyaknya permasalahan yang ada. Berdasarkan data yang diperoleh dari suarajabar.id (Ramadhan, 2022) bahwa Jawa Barat disebut menjadi provinsi dengan pengguna internet tertinggi di Indonesia yakni ada sekitar 35,1 juta orang. Hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang akan berpengaruh pada keberlangsungan kehidupan bermasyarakat di Jawa Barat. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya menjadi tugas besar seorang kepala daerah untuk mencari solusi dari semua permasalahan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka kepala daerah dalam hal ini gubernur memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan kehidupan bermasyarakat.

Gubernur sebagai kepala daerah memegang peranan penting dalam aktualisasi bela negara di daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang kepala daerah memiliki gaya kepemimpinan yang dimiliki dan diterapkan. Kepemimpinan seorang kepala daerah menjadi landasan bagi rakyatnya dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Seorang pemimpin menjadi teladan bagi rakyatnya yang memiliki prinsip dan tujuan serta memiliki jiwa kepemimpinan. Oleh sebab itu jiwa kepemimpinan sangat penting dimiliki oleh seorang kepala daerah terutama dalam mendorong aktualisasi bela negara masyarakat di daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Studi Literasi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berfokus pada eksplorasi dan pemahaman data secara mendalam. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dimana data yang nanti disajikan lebih banyak dalam bentuk kata-kata dibandingkan dalam bentuk angka. Pengambilan data dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data primer dan

sekunder. Dimana data diambil dari jurnal, buku-buku, penelitian terdahulu, artikel ilmiah, literatur dan berita dari situs-situs resmi.

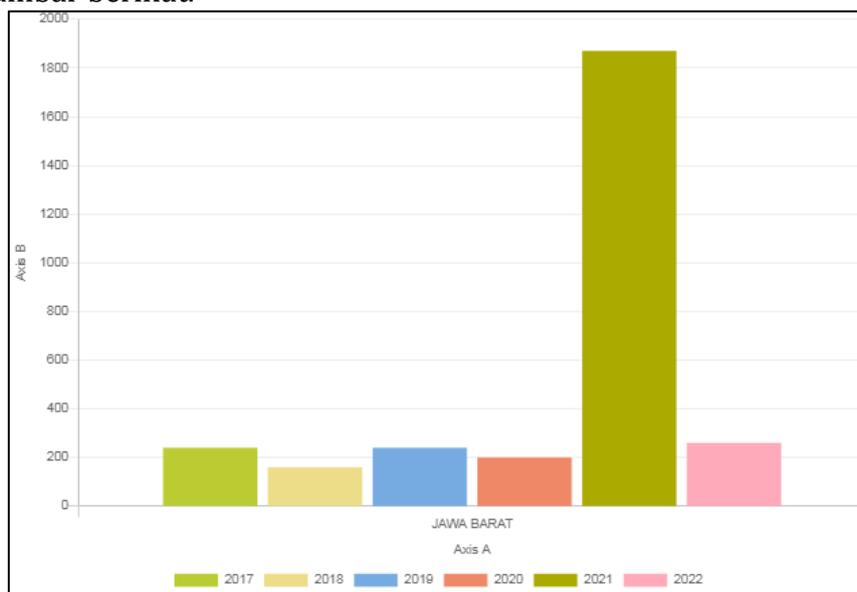
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional yang disiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman. Penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara melalui pemberdayaan organisasi masyarakat, merupakan suatu upaya penyebarluasan kesadaran bela negara guna mendukung terwujudnya sistem pertahanan negara yang tangguh.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011, peningkatan kesadaran bela negara di daerah bertujuan untuk : Menanamkan sikap dan perilaku cinta tanah air bagi setiap WNI dan rela berkorban bagi bangsa dan negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan implementasi bela negara pada masyarakat di Jawa Barat tidak terlepas dari adanya faktor kepemimpinan dari seorang kepala daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya berkaitan dengan implementasi bela negara, kepala daerah dalam hal ini gubernur dibantu oleh institusi/lembaga terkait yang menaunginya seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Barat dan dibantu oleh satuan TNI yang ada di Jawa Barat dalam pelaksanaannya. Sejauh ini implementasi Bela Negara pada masyarakat di Jawa Barat sudah baik, hal ini terlihat dari data yang diperoleh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengenai Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Pendahuluan Bela Negara yang terlihat pada gambar berikut.



**Gambar 1. Grafik Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Pendahuluan Bela Negara di Jawa Barat**

Sumber : opendata.jabarprov.go.id

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan pendahuluan bela negara pada tahun 2021 cukup tinggi dibanding tahun-tahun lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi bela negara di Jawa Barat sudah cukup baik. Namun, seperti yang terlihat bahwa pada tahun 2022 tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan pendahuluan bela negara cenderung menurun, hal ini dapat disebabkan oleh dampak dari pandemi Covid-19 sehingga berakibat pada menurunnya kesadaran masyarakat terkait implementasi bela negara di Jawa Barat.

Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan oleh kepala daerah provinsi Jawa Barat dalam hal ini gubernur agar tingkat partisipasi masyarakat terhadap bela negara kembali naik. Bentuk nyata dari upaya tersebut diantaranya adalah mengajak para ASN di Jawa Barat untuk membeli produk UMKM melalui aplikasi borongdong.id sebagai upaya pemulihan ekonomi. Aplikasi borongdong.id berusaha membangkitkan nilai kebangsaan warga khususnya ASN lewat tagline "Bela Negara dengan Belanja". Karena saat masih dalam masa pandemi COVID-19 yang merupakan sebuah perang, maka gubernur Jawa Barat menghimbau masyarakat semua untuk bela negara. Masyarakat yang memiliki ilmu bela negara dengan ilmu, yang memiliki harta bela negara dengan belanja. Tagline 'Bela Negara dengan Belanja', bertujuan agar semangat kebangsaan muncul dalam jiwa masyarakat. Dengan upaya membangkitkan UMKM tersebut, para ASN di Jawa Barat turut serta dalam aktualisasi bela negara di bidang ekonomi.

Selain itu, Gubernur Jawa Barat bersama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan pemilihan Duta Bela Negara Jawa Barat tahun 2022 yang digelar pada hari Kamis, 28 Juli 2022 di Kabupaten Subang. Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat tersebut diharapkan dapat menghasilkan generasi muda yang mampu menyebarluaskan bela negara dan nasionalisme kepada masyarakat. Duta Bela Negara Jawa Barat 2022 memiliki tugas khusus untuk mengimplementasikan kepada masyarakat cara menjaga NKRI dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pemilihan Duta Bela Negara Jawa Barat bertujuan untuk menyebarkan semangat bela negara di kalangan generasi muda, yang berujung pada tumbuhnya nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air, serta terwujudnya Jabar Juara Lahir Bathin. Hal tersebut merupakan bentuk kepemimpinan strategis yang dilakukan oleh kepala daerah dalam hal ini gubernur Jawa Barat dalam melakukan aktualisasi bela negara di masyarakat.

## Pembahasan

Kepemimpinan merupakan sebuah hubungan yang erat antara seorang dan kelompok manusia karena ada kepentingan yang sama dalam membangun organisasi. Sehingga dalam kepemimpinan akan melibatkan pemimpin (*influencer*) yakni orang yang akan mempengaruhi tingkah laku pengikutnya (*influence*) dalam situasi dan kondisi tertentu (Budi, 2013). Finkelstein dan Hambrick (1996) mengartikan kepemimpinan strategis sebagai kemampuan para eksekutif yang memiliki tanggungjawab penuh terhadap karakteristik setiap individu dan cara setiap individu melakukan aktivitas serta dampak yang ditimbulkan dari aktivitas itu memengaruhi hasil dan tujuan organisasi (Finkelstein, 1996).

Berdasarkan teori *Upper Echelon Theory* yang dikemukakan Hambrick & Mason (1984) oleh dikatakan bahwa pemimpin pada umumnya beroperasi pada tingkat strategis sehingga organisasi merupakan refleksi dari kognisi dan nilai-nilai dari manajer puncak mereka. Karena itu, pengetahuan khusus, pengalaman, nilai-nilai, dan preferensi dari manajer puncak akan mempengaruhi penilaian mereka tentang lingkungan eksternal dan pilihan yang mereka buat terkait dengan strategi organisasi. Maksudnya adalah dalam mengembangkan kapasitas kepemimpinan strategis harus dimulai dengan perubahan pola pikir baik individu/karyawan

maupun organisasi. Kepemimpinan strategis adalah proses bukanlah posisi, yang menuntut keterlibatan dan komitmen untuk belajar. (Hambrick, 1984)

Kepemimpinan strategis yang bersifat multifungsi menjadikan seorang pemimpin harus melibatkan segenap sumber daya manusia dalam organisasi. Dalam menghadapi kompleksitas dan sifat global dari medan yang kompetitif, maka perkataan, tindakan dan kemampuan seorang pemimpin dalam mewujudkan visi yang hendak dicapai haruslah secara efektif dapat mempengaruhi perilaku, pikiran dan perasaan yang dipimpinya.

Kepala daerah dalam hal ini gubernur berperan penting dalam proses kepemimpinan strategis bagi organisasi di wilayah provinsi. Sebagai seorang pemimpin, gubernur merupakan figur utama yang dilihat masyarakatnya yang kemudian akan mempengaruhi bagaimana masyarakat bertindak dan melakukan kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku gubernur sebagai seorang pemimpin harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan daerah yang dipimpinya, sehingga sangat diperlukan ilmu kepemimpinan yang dapat menunjang kinerja gubernur dalam memimpin masyarakatnya.

Penguasaan ilmu kepemimpinan merupakan syarat mutlak bagi kepala daerah dalam menunjang tugas dan tanggungjawab sebagai pemimpin. Kepemimpinan merupakan sesuatu yang melekat pada diri seorang pemimpin berupa kepribadian (*personality*), kemampuan (*ability*) dan kesanggupan (*capability*). Selain itu kepemimpinan merupakan serangkaian kegiatan (*activity*) pemimpin yang terkait dengan kedudukan (posisi) serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. Dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin kepala daerah melakukan interaksi antar pemimpin, bawahan dan situasi (Widiyaningrum, 2021).

Sebagai seorang pemimpin yang mengimplementasikan ilmu kepemimpinan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, perlu adanya strategi agar pemimpin dapat mencapai tujuan yang diharapkannya. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Menurut Chandler (Rangkuti, 1997) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi dalam kaitannya dengan tujuan panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Menurut (Rafiq, 2018) ada 4 (empat) strategi kepemimpinan AURA (*Authority, Used, Responsibility, dan Attitude*), yaitu:

1. *Authority* (Kewenangan). Dalam strategi *authority* yaitu adanya kewenangan Pemerintah Daerah yang jelas dimana kewenangan tersebut bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan dengan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.
2. *Used* (Sistem yang digunakan). Strategi *used* yaitu adanya sistem yang digunakan dalam menjalankan kebijaksanaan, dimana adanya sistem yang jelas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan secara utuh dan menyeluruh.
3. *Responsibility* (Tanggung Jawab). Strategi *responsibility* yaitu adanya tanggung jawab yang penuh dari Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme yang diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang sesuai keinginan masyarakat.
4. *Attitude* (Sikap). Strategi *attitude* yaitu adanya sikap pemerintah daerah yang terbuka, dimana Pemerintah Daerah memiliki sikap yang terbuka untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerah.

Bela Negara adalah tekad, sikap dan perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bela negara adalah upaya mempertahankan dan meningkatkan kewaspadaan diri dan lingkungan dari ancaman internal dan external negara. Tugas bela

negara bukan hanya tugas TNI dan Polri semata. Namun bela negara merupakan tugas dan kewajiban kita semua sebagai warga negara Indonesia, sebagai bagian dari komponen bangsa.

Wujud nyata dari implementasi bela negara tertuang dalam nilai-nilai dasar bela negara yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan bela negara dalam kehidupan. Nilai-nilai dasar bela negara tersebut adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara; setia pada Pancasila sebagai ideologi negara; rela berkorban untuk bangsa dan negara; serta kemampuan awal bela negara.

Strategi kepemimpinan *AURA* (*Authority, Used, Responsibility* dan *Attitude*) dapat diimplementasikan dalam proses aktualisasi bela negara pada masyarakat di Jawa Barat. Dengan memadukan antara strategi kepemimpinan kepala daerah Jawa Barat dan nilai-nilai dasar bela negara maka bentuk aktualisasi bela negara masyarakat di Jawa Barat dapat dilakukan sebagai berikut.

#### 1. Cinta Tanah Air

Mencintai dan mengenal tanah air untuk selalu waspada dan siap dalam membela tanah air Indonesia dari segala ancaman yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. Bentuk cinta tanah air adalah dapat berupa rasa memiliki, dengan cara merawat tanah dan menjaga perkarangan serta seluruh ruang wilayah tanah air Indonesia, tidak melakukan eksploitasi untuk kepentingan sendiri maupun kelompok dan golongan, bangga sebagai bangsa Indonesia, menjaga diri tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak nama baik bangsanya, menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya, mencintai produk dalam negeri, melestarikan kesenian dan budaya Indonesia, belajar yang baik dengan mengetahui pulau dan jumlahnya serta wilayah Indonesia baik secara astronomis dan geografisnya (Rahayu, 2021).

Dengan menggunakan strategi *Responsibility*, Kepala Daerah memiliki tanggung jawab dalam aktualisasi bela negara pada masyarakat di Jawa Barat dapat memberikan contoh yang baik dalam upaya mencintai tanah air, melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan keamanan dan keutuhan ruang wilayah, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan dan melestarikan budaya daerah sebagai bentuk implementasi bela negara.

#### 2. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Sadar sebagai warga negara Indonesia dan bagian dari bangsa serta negara dalam bentuk sikap, perilaku dan kehidupan pribadi untuk terus senantiasa memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat dilakukan dengan mendarma baktikan profesi dan seluruh potensi yang dimiliki untuk dapat terus berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan aturan yang berlaku, mengenal keragaman individu di rumah maupun di lingkungannya, berfikir bersikap dan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara, serta memiliki kesadaran kemajemukan atau keragaman suku, agama, bahasa, adat istiadat dan budaya.

Strategi *Authority* dapat diimplementasikan oleh Kepala Daerah dalam upaya menyadarkan masyarakat untuk berbangsa dan bernegara. Kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Daerah dapat dimaksimalkan dalam upaya menjadikan masyarakat lebih menyadari dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, patur dan taat terhadap peraturan yang berlaku, serta toleransi terhadap perbedaan dan keragaman bahasa, adat istiadat, suku, agama dan budaya.

#### 3. Yakin Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Meyakini dan mengamalkan Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu menyadari dengan segenap hati bahwa dasar, pedoman dan pandangan hidup bangsa ialah Pancasila, maka saat dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dilandasi dengan dasar

Pancasila, sebagai bangsa yang majemuk atas suku, agama, budaya tidak ada cara lain maka hanya dengan Pancasila-lah yang dapat memwadahi dan menjembatani kemajemukan dari bangsa Indonesia, maka walaupun kita tidak sama tetapi tetap bersatu sebagai Indonesia. Pancasila lambang ideologi negara dapat tercapai dengan membangun kesadaran yaitu dilandasi Pancasila pada kebenaran NKRI, melalui pengamalan Pancasila pada kegiatan sehari-hari dapat membuat negara Indonesia tetap berjaya, bisa menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara musyawarah dan kompromi, Pancasila bisa melindungi karakter dan mental negara terhadap segala macam ancaman, memahami nilai-nilai Pancasila, mengimplementasikan Pancasila pada kehidupan sehari-hari, Pancasila merupakan pemersatu bangsa dan negara.

Strategi *Used* dapat digunakan dalam implementasi bela negara pada nilai-nilai berkaitan dengan pancasila. Dengan membangun sistem yang terpadu dan terarah berkaitan dengan pengamalan Pancasila dalam kehidupan, dapat menjadikan masyarakat lebih terarah dan terpadu untuk mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan. Bentuk implementasi bela negara berkaitan dengan keyakinan terhadap Pancasila dapat dilakukan pada proses pendidikan kearganegaraan dan bela negara di sekolah. Kepala Daerah dapat membentuk sistem yang terpadu untuk aktualisasi bela negara agar berjalan dengan baik di masyarakat.

#### 4. Rela Berkorban Demi Bangsa dan Negara

Rela berkorban demi bangsa dan negara melalui mengutamakan kepentingan umum (bangsa dan negara) daripada kepentingan sendiri maupun kelompok dan golongan. Bersedia berkorban fisik, waktu, pikiran dan harta-bendanya hanya untuk kepentingan umum, maka jika waktunya telah tiba sudah bersiap diri untuk berkorban jiwa raga untuk kepentingan negaranya.

Strategi *Attitude* dapat diaplikasikan oleh kepala daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran bela negara di masyarakat. Kepala daerah beserta pihak terkait bela negara dapat membuka forum bagi masyarakat terkait ide maupun gagasan yang dapat diterapkan dan digunakan di Jawa Barat dalam implementasi bela negara sehingga diharapkan masyarakat lebih peduli dan rela berkorban bagi bangsa dan negara.

#### 5. Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara

Tiap-tiap rakyat harus bergegas berupaya memiliki kemampuan awal bela negara dalam membuktikan siap kapan pun untuk membela negaranya. Secara mental/psikis memiliki sifat ulet, disiplin dan mentaati semua peraturan dan undang-undang, yakin terhadap dirinya sendiri, tidak mudah pasrah dan menyerah untuk mengatasi rintangan dalam mewujudkan tujuan nasional, tahan terhadap berbagai ujian, kemampuan awal bela negara bisa didukung melalui fisik yang memiliki keterampilan dan kondisi kesehatan yang baik dan prima.

Dalam upaya menjadikan masyarakat memiliki kemampuan awal bela negara, kepala daerah dapat menerapkan strategi *Responsibility* dan *Authority* dimana kepala daerah dengan kewenangannya dapat mengarahkan masyarakat untuk melakukan upaya bela negara, disertai tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Kepala daerah dapat menyelenggarakan program-program yang berkaitan dengan implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari seperti mengajak ASN untuk berbelanja di UMKM sebagai upaya bela negara dengan belanja. Selain itu, kepala daerah dapat bersinergi dengan TNI untuk menyelenggarakan Program Pembinaan Bela Negara bagi masyarakat demi terciptanya masyarakat yang memiliki kemampuan awal bela negara.

## KESIMPULAN

Menumbuhkan kesadaran bela negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat dalam hal ini kementerian pertahanan saja, melainkan pemerintah daerah mempunyai peran dalam sosialisasi bela negara di daerah. Bela Negara tidak hanya mengangkat senjata, bela negara memiliki arti yang lebih mendalam terlebih dalam kondisi damai seperti sekarang ini, yaitu bagaimana seorang warga negara bersikap dalam mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Gubernur sebagai kepala daerah memegang peranan penting dalam aktualisasi bela negara di daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang kepala daerah memiliki gaya kepemimpinan yang dimiliki dan diterapkan. Kepemimpinan seorang kepala daerah menjadi landasan bagi rakyatnya dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

Pelaksanaan implementasi bela negara pada masyarakat di Jawa Barat tidak terlepas dari adanya faktor kepemimpinan dari seorang kepala daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya berkaitan dengan implementasi bela negara, kepala daerah dalam hal ini gubernur dibantu oleh institusi/lembaga terkait yang menaunginya seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Barat dan dibantu oleh satuan TNI yang ada di Jawa Barat dalam pelaksanaannya.

Kepala daerah dalam hal ini gubernur berperan penting dalam proses kepemimpinan strategis bagi organisasi di wilayah provinsi. Sebagai seorang pemimpin, gubernur merupakan figur utama yang dilihat masyarakatnya yang kemudian akan mempengaruhi bagaimana masyarakat bertindak dan melakukan kehidupan sehari-hari. Strategi kepemimpinan *AURA* (*Authority, Used, Responsibility* dan *Attitude*) dapat diimplementasikan dalam proses aktualisasi bela negara pada masyarakat di Jawa Barat. Wujud nyata dari implementasi bela negara tertuang dalam nilai-nilai dasar bela negara yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan bela negara dalam kehidupan diantaranya cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara; setia pada Pancasila sebagai ideologi negara; rela berkorban untuk bangsa dan negara; serta kemampuan awal bela negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aiba, K., Harnowo, S., Suprpto, & Saragih, H. J. (2018, Desember). Peran Pemerintah Kota Pasuruan dalam Peningkatan Kesadaran Bela Negara. *Jurnal Manajemen Pertahanan*, 4(2), 46-63.
- Budi, M. W. (2013). Kepemimpinan Kepala Daerah Model Pendekatan Persuasif dan Dialogis (Belajar dari Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta).
- Christiansen, N., Fatiha, M. A., Ar-Rahman, F., & Tarina, D. D. (2022). Pentingnya Implementasi Sikap Bela Negara oleh Seorang Pemimpin dalam Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kepemimpinan*.
- Finkelstein, S. a. (1996). *Strategic Leadership: Top Executives and Their Effects on Organizations*. St. Paul, Minneapolis: West Publishing Company.
- Hambrick, D. C. (1984). Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers. *The Academy of Management Review*, 9(2), 193-206. doi:https://doi.org/10.2307/258434
- Jabar, H. (2022, Agustus 19). *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Pendahuluan Bela Negara*. Retrieved from Open Data Jawa Barat: <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/tingkat-partisipasi-masyarakat-dalam-pendidikan-pendahuluan-bela-negara-ppbn-berdasarkan-tahun-di-jawa-barat>
- Kaloh, J. (2009). *Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lukihardianti, A. (2021, Februari 11). *Melalui borongdong.id, ASN Jabar Bela Negara dengan Belanja*. Retrieved from Republika Jabar:

<https://repjabar.republika.co.id/berita/qoc9mv352/melalui-borongdongid-asn-jabar-bela-negara-dengan-belanja>

Rafiq, A. (2018). *Reformasi Birokrasi*. Malang: Media Nusa Creative.

Rahayu, S. K. (2021). Penguatan Kesadaran Bela Negara pada Remaja Milenial Menuju Indonesia Emas. *Jurnal Pedagogika*, 12(2), 134-151.

Ramadhan, A. S. (2022, Maret 02). *Punya 35,1 Juta Pengguna Internet, Jawa Barat Dinilai Layak Sandang Predikat Digital Province*. Retrieved Agustus 23, 2022, from suarajabar.id: <https://jabar.suara.com/read/2022/03/02/183623/punya-351-juta-pengguna-internet-jawa-barat-dinilai-layak-sandang-predikat-digital-province>

Rangkuti, F. (1997). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Widiyaningrum, W. Y. (2021). Kepemimpinan Kepala Daerah Melalui Strategi AURA : Sebuah Kajian Teoritis. *Jurnal JISIPOL*, 5(1), 52-64.

Zulkarnaen, A. (2022, Juli 28). *Pemprov Jabar Kukuhkan 30 Pasang Duta Bela Negara*. Retrieved from rri.co.id: <https://rri.co.id/bandung/jawa-barat/1558078/pemprov-jabar-kukuhkan-30-pasang-duta-bela-negara>